

MONITOR

Kebijakan Pembangunan Internasional

PERAN PEMBERI DANA BANTUAN TIDAK TRADISIONAL DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

NR. 8/2021

Pendukung Pembangunan Negara Berkembang dan Multilateralisme

Peran Indonesia dalam Bantuan Pembangunan Internasional

Jan Senkyr

- › Indonesia sejak kemerdekaannya terlibat dalam bantuan pembangunan negara berkembang melalui Kerjasama Selatan-Selatan. Meskipun masih dalam cakupan yang relatif kecil, kerjasama pembangunan negara berkembang tetap menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia.
- › Indonesia berkomitmen dalam mendukung kerjasama dan solidaritas antara negara selatan dunia dan mengambil peran yang semakin penting dalam panggung politik internasional. Indonesia tampil sebagai pendukung multilateralisme dan tatanan global yang berbasis peraturan.
- › Sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, fokus kebijakan luar negeri dan pembangunan Indonesia adalah terutama pada negara ASEAN dan negara tetangganya.
- › Pada tahun 1960an dan 1970an, kerjasama pembangunan negara berkembang Indonesia difokuskan terutama pada bantuan teknis dan konsultasi, serta pada pengiriman barang. Indonesia kemudian memanfaatkan kekuatan ekonominya yang semakin bertumbuh untuk memperluas program pembangunannya. Melalui pendirian lembaga pembangunan internasional Indo-Aid pada akhir tahun 2019, kekurangan struktural yang terdapat sebelumnya dapat diatasi.
- › Indonesia yang sebagai kekuatan regional semakin bertumbuh di Asia Tenggara, meskipun keterbatasan anggaran akan terus memainkan peran penting dalam kerjasama pembangunan internasional di masa depan dan dapat menjadi mitra global dalam memecahkan permasalahan pembangunan global yang mendesak.

Daftar isi

Pendahuluan	2
Kerjasama pembangunan tradisional	3
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia	4
Pendirian lembaga bantuan pembangunan internasional Indo-AID	6
Fokus terhadap Indo-Pasifik	7
Negara mitra kerjasama bantuan pembangunan	8
Kesimpulan	9
Imprint	11
Penulis	11

Pendahuluan

Indonesia sejak kemerdekaannya memiliki dedikasi tinggi terhadap kerjasama dan solidaritas antar negara selatan dunia (global south) dan mengambil peran yang semakin penting di panggung politik internasional. Pada konferensi KTT Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung untuk pertama kalinya keinginan untuk kerjasama dan keinginan kedaulatan bangsa-bangsa “Dunia Ketiga” dirumuskan serta sebuah gagasan untuk tatanan nonblok internasional diuraikan. Hasil yang diperoleh adalah Gerakan Non-Blok (GNB) yang didirikan pada tahun 1961. Indonesia memainkan peran penting dalam pendirian GNB. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk bertindak sebagai instansi netral dalam konflik antara blok timur dan barat yang mewakili perdamaian, kedaulatan dan mendukung kerjasama antara negara berkembang. Indonesia juga menjadi penggerak berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) yang mendukung kerjasama ekonomi, politik dan sosial di wilayah Asia Tenggara.

Sebagai kekuatan regional Asia Tenggara, Indonesia memainkan peran yang semakin penting di antara negara-negara berkembang. Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga dengan populasi terbesar keempat dan jumlah umat Muslim terbesar di dunia serta merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota kelompok negara-negara industri dan berkembang yang paling penting yaitu G20 dan akan menjadi presiden G20 untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Pemerintah Pusat Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sangat berkomitmen terhadap multilateralisme dan tatanan politik global yang berlandaskan aturan serta mendukung perdamaian dan bantuan pembangunan di seluruh dunia. Atas dasar tersebut kebijakan luar negeri dan pembangunan Indonesia diformulasi.

Kerjasama pembangunan internasional tradisional

Keterlibatan Indonesia dalam pemberian bantuan pembangunan internasional yang dilakukan dalam rangka Kerjasama Selatan–Selatan (KSS) sudah berlangsung sejak berdirinya Republik Indonesia. Hanya satu tahun kemudian setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras sebagai bantuan kemanusiaan ke India yang pada saat itu menderita akibat bencana kelaparan yang berat. Pendiri republik dan presiden pertama Indonesia, Soekarno adalah pejuang dan pendukung dekolonisasi dan kedaulatan negara–negara selatan dunia dan menfokuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan itu. Sebagai tuan rumah dari Konferensi Asia–Afrika Bandung tahun 1955 Indonesia bersama dengan pemimpin negara lainnya mendorong didirikannya Gerakan Non–Blok (GNB) pada tahun 1961. Pada Konferensi Perdagangan Dunia Perserikatan Bangsa–Bangsa yang pertama (UNCTAD) tahun 1964 didirikan kelompok 77 (G77) yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat Kerjasama Selatan–Selatan. Sebagai reaksi terhadap turbulensi ekonomi di tahun 70an disepakati pada pertemuan PBB di Buenos Aires tahun 1978 sebuah action plan untuk mendorong implementasi TCDC (Technical Cooperation Among Developing Countries) yang dinamai BAPA (Buenos Aires Plan of Action). Dengan demikian Kerjasama Selatan–Selatan diberikan kerangka formil dan KSS menjadi komplemen terhadap transfer teknologi Utara–Selatan yang selama ini diutamakan oleh negara–negara industri.

Kerjasama pembangunan internasional Indonesia di tahun 60an dan 70an terutama berfokus pada bantuan teknis dan konsultasi serta pengiriman barang. Kemudian, di bawah Presiden Suharto, Indonesia menggunakan kekuatan ekonominya yang semakin bertumbuh untuk memperluas dan melembagakan program–program pembangunannya. Pada tahun 1981 didirikan oleh pemerintah Indonesian Technical Cooperation Program (ITCP) yang pada tahun 90an beralih kepada South–South Technical Cooperation di bawah arahan Sekretariat Negara (SETNEG). Kerjasama tersebut terutama terdiri dari program pelatihan dan konsultasi di bidang pertanian, perikanan, keluarga berencana dan penanggulangan bencana untuk negara–negara di Afrika dan Asia.

Pada tahun 1992 Indonesia menjadi Ketua Gerakan Non Blok (GNB) dan pada tahun 1995 didirikan di Jakarta, *NAM Center for South–South Technical Cooperation* (NAM–CSSTC). NAM–CSSTC sebagai lembaga koordinasi program pembangunan dari negara GNB terutama berfokus pada bidang pemberantasan kemiskinan, bantuan bagi UKM, kesehatan, agraria, lingkungan hidup serta teknologi informasi dan komunikasi.

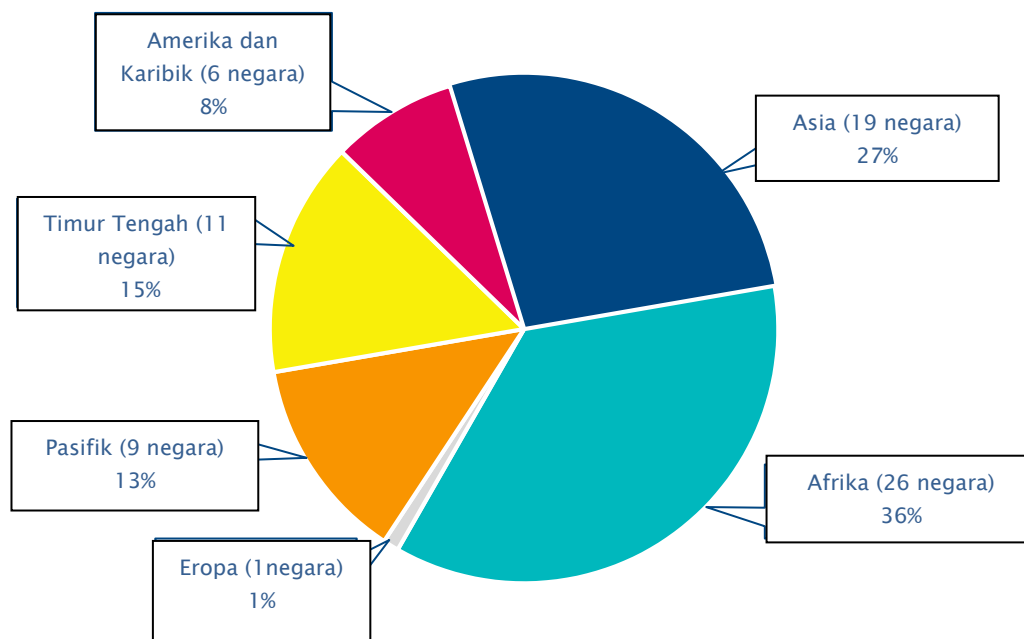
Banyak kegiatan ITCP dilakukan sebagai kemitraan triangular dengan bantuan pendanaan dari negara ketiga. Donor terpenting pada tahun 1990an termasuk United Nations Development Programme (UNDP) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) serta pendonor lainnya seperti USAID, Islamic Development Bank ISDB dan lain–lain.

Ketika Indonesia diterima menjadi anggota G20 pada tahun 1999, peran dan peluang dalam Kerjasama Selatan–Selatan menjadi semakin besar. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agenda politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri dan keterlibatan Indonesia di kancah internasional semakin meningkat. Kerjasama Selatan–Selatan menjadi prioritas dalam politik luar negeri. Dalam rangka peringatan 50 tahun Konferensi Bandung pada tahun 2005, disepakati pada pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh 89 negara, Deklarasi Kemitraan Strategis Baru Asia–Afrika (Declaration of the New Asian–African Strategic Partnership). Deklarasi ini bertujuan untuk menghasilkan kerjasama yang praktis dan berkelanjutan serta kemitraan yang saling menguntungkan dan setara dan berdasarkan visi dan misi bersama.

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia pada tahun 2010, pertama kali dimasukkan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah Indonesia untuk tahun 2010–2014. Untuk itu dibentuk Tim Koordinasi Nasional KSST sebagai badan koordinasi yang terdiri dari empat kementerian: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan laporan tahunan Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2016, terdapat lebih dari 780 kegiatan dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan yang mendapatkan bantuan anggaran sebesar 57,4 juta USD serta memberi manfaat bagi sekitar 5000 peserta dari Asia, Afrika, Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Negara-negara yang bermitra adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka dan Timor-Leste di Asia, Tanzania, Ethiopia, Kenya dan Uganda di Afrika dan Fiji, Samoa dan Papua Nugini di Pasifik. Pada tahun 2016, anggaran kegiatan kembali meningkat signifikan menjadi USD 15 juta untuk 51 program. Pembiayaan program-program KSST sebagian dilakukan melalui anggaran negara Indonesia dimana keempat kementerian memiliki anggaran tersendiri serta melalui bantuan pendanaan dari negara ketiga dalam bentuk Kerjasama triangular. Pada tahun 2016 kerjasama triangular mencakup 51 persen dari cakupan total KSS.

Grafik 1: Program-program Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia berdasarkan wilayah, 2018 (dalam persen)



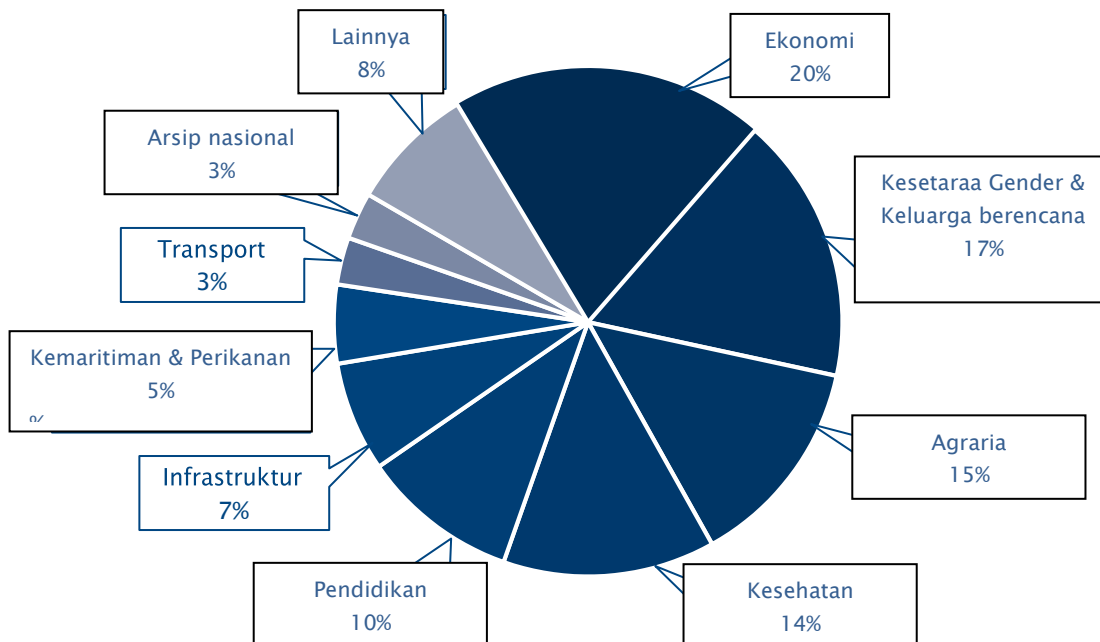
Sumber: Grafik sendiri berdasarkan *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2018*.

Presiden Joko Widodo meneruskan arah politik luar negeri pendahulunya dan melanjutkan KSS setelah menjabat menjadi presiden pada tahun 2014. Dalam programnya Nawa Cita yang berisi sembilan prioritas, KSS menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri, keamanan dan pembangunan. Prinsip-prinsip program sembilan poin ini dimasukkan dan dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tahun 2015–2019. Pada konferensi internasional peringatan 60 tahun konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung (Jakarta dan

Bandung, April 2015) Presiden Joko Widodo menyatakan diperlukannya tatanan ekonomi yang baru yang memberi kesempatan bertumbuhnya negara kekuatan ekonomi baru yang dapat memberi kontribusi bagi keadilan dan perdamaian. Dengan ditetapkannya New Asian–African Strategic Partnership (NAASP) peran penting KSS digarisbawahi kembali serta memberi dorongan berkembangnya kerangka kerja operasional untuk sistem monitoring yang diperlukan.

Kegiatan dari Kerjasama Selatan–Selatan dilanjutkan pada tahun 2017 dan 2018. Menurut laporan tahunan SETNEG terkait KSS pada tahun 2017 dilaksanakan 59 program untuk 1030 peserta dari 54 negara terutama dalam bentuk program pelatihan (9%), penugasan ahli (13%) dan lokakarya (14%) serta beasiswa (2%). Program KSS terutama diarahkan pada bidang pertanian (22%), infrastruktur (18%), penanggulangan bencana (10%), ekonomi (7%) dan kesehatan (7%) dan sebagian besar (59%) dibiayai APBN. Negara penerima termasuk Timor–Leste, Fiji, Kenya, Papua Nugini, Afghanistan, Filipina, Kepulauan Solomon, Sudan dan Palestina. Pada tahun 2018 juga 59 program mendapatkan bantuan pembiayaan yang menguntungkan 1313 peserta dari 72 negara. Titik berat diletakkan pada sektor ekonomi (20%), gender dan keluarga berencana (17%), kesehatan (13,5%), pertanian (13,5%) dan pendidikan (10%). Selain Timor Leste, Fiji, Afghanistan dan Palestina, negara penerima bantuan bertambah Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka dan Nepal. Sama seperti tahun sebelumnya, bantuan pembangunan terutama terdiri dari program pelatihan dan konsultasi, serta meningkat pemberian beasiswa.

Grafik 2: Pembagian sektoral program KSS Indonesia, 2018 (dalam persen)



Sumber: Grafik sendiri berdasarkan *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2018*.

Pada tahun 2019, dana KSS Indonesia digunakan untuk membiayai program-program bantuan di negara kepulauan Pasifik seperti Tuvalu, Kepulauan Solomon, Fiji, Nauru dan Kiribati, serta di Myanmar dan Filipina.

Melihat kebijakan pembangunan Indonesia, nampak bahwa Indonesia masih merupakan penerima bantuan program pembangunan dan bantuan dana internasional, jika dibandingkan dengan kegiatan KSS besaran anggarannya relatif kecil. Anggaran kegiatan KSS tahun 2016 hanya USD 15,4 juta dan pada tahun-tahun berikut tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai perbandingan: Tahun 2017 berdasarkan Bank Dunia, Indonesia menerima 280 juta USD yang merupakan Bantuan Pembangunan Resmi (OAD). Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan juga mengungkapkan terdapatnya kekurangan dalam kejelasan struktur: Koordinasi, organisasi dan institusionalisasi yang kurang. Tim Koordinasi Nasional KSST yang terdiri dari empat kementerian, bertanggung jawab atas konsepsi, perencanaan, pembiayaan dan koordinasi proyek KSS. Kementerian bidang lainnya serta pemerintahan daerah, perusahaan dan organisasi non-pemerintah dilibatkan dalam pelaksanaannya. Perbedaan kepentingan dan kompetensi masing-masing stakeholders serta tidak adanya peraturan hukum yang jelas dan seragam, menyebabkan bahwa berulang kali terjadi hasil kerjasama yang kurang optimal dan kurang efisien. Masalahnya dapat diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia dan memicu diskusi pada tahun 2016 tentang pembentukan badan terpadu untuk Kerjasama Selatan-Selatan. Namun proses pengambilan keputusannya sangat sulit dan panjang. Meskipun pada tahun 2017 keputusan Presiden memberi landasan peraturan dan sekaligus mandat untuk pembentukan sebuah badan pembangunan, kelambatan birokrasi dan persaingan antara lembaga pemerintahan yang terlibat menyebabkan penundaan.

Pendirian Lembaga Bantuan Pembangunan Internasional Indo-Aid

Proses pembentukan lembaga bantuan pembangunan internasional bernama Indo-AID baru berhasil diselesaikan sesaat sebelum berakhir masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo. Pada bulan Oktober tahun 2019 dengan kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kala, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proses, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro, diumumkan secara resmi pembentukan Lembaga untuk Pembangunan Internasional (Indonesian AID). Indonesian AID (Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, LDKPI) diberkahi dengan modal awal sebesar USD 212 juta dan diharapkan akan menerima dana tahunan dari anggaran negara mulai tahun 2020 dan seterusnya. Menteri Luar Negeri, Marsudi menyebutkan lembaga tersebut sebagai suatu hal berharga yang dengan kehadirannya, mengangkat Indonesia di panggung internasional dan memperkuat perannya dalam politik pembangunan internasional. Indo-AID merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dan berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nr. 57/2019, Indo-AID bertugas untuk rekrutmen dan distribusi uang bantuan dan hibah kepada proyek-proyek pengembangan kepada negara lain dan organisasi internasional. Untuk kerjasama teknis tetap Tim Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan (NCT-SSC) yang berwenang dan juga untuk mengkoordinasikan kerjasama teknis triangular dengan negara ketiga.

Alokasi dana bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan (menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara penerima) dan sejalan dengan pedoman kebijakan pembangunan luar negeri Indonesia. Prioritas diberikan kepada program bantuan bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan titik berat pembangunan yang berkelanjutan, perubahan iklim dan pemberantasan kemiskinan maka diharapkan keselarasan dapat diraih dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari PBB.

Dengan merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 secara signifikan maka pelaksanaan kerjasama pembangunan Indonesia mengalami perlambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya. Hanya aktivitas pelatihan dan konsultasi serta program-program bantuan material yang dapat dilakukan. Pada bulan Desember tahun 2020, ditandatangani pada konferensi daring dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta program-program kerjasama dan bantuan dana untuk Timor-Leste, Kepulauan Solomon dan Fiji. Berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, program-program tersebut bertujuan terutama untuk bantuan dalam pemberantasan pandemi Covid-19 dan mendukung pengiriman bahan medis dan teknik dari Indonesia. Program-program bantuan tersebut merupakan bagian dari kemitraan bilateral dengan negara-negara Pasifik, yang mencakup langkah-langkah kerjasama ekonomi, pembangunan dan teknis.

Fokus pada Indo-Pasifik

Kerjasama Selatan-Selatan dan program bantuan pembangunan Indonesia dapat dipahami dari konteks kepentingan kebijakan luar negeri, strategi dan prioritas Indonesia. Sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, fokus politik luar negeri Indonesia terutama pada hubungan antar negara ASEAN dan negara-negara tetangganya. Selain itu, Indonesia secara tradisional berusaha untuk menjaga dalam persaingan global, hubungan yang seimbang dengan negara-negara kekuatan dunia, yaitu saat ini terutama Amerika Serikat dan Cina. Seiring dengan semakin bergesernya fokus geopolitik internasional ke kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dan ASEAN juga menyesuaikan prioritas dan pedoman strategis mereka sesuai berkembang tren ini.

Pada KTT ASEAN di Bangkok tahun 2019, atas saran Indonesia ditetapkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang merupakan lembar strategi dimana kepentingan dan prioritas politik dari kesepuluh negara anggota di kawasan Indo-Pasifik akan dibawa ke suatu kesamaan. Fokusnya adalah prinsip-prinsip sentralitas, netralitas dan peran kepemimpinan dari negara-negara ASEAN di Indo-Pasifik. Tujuan utama adalah mendorong kerjasama ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan serta penguatan keamanan maritim di wilayah laut Pasifik dan Hindia. Melalui konsep tersebut dimaksudkan untuk melengkapi Master Plan untuk ASEAN Connectivity 2025 (MPAC). Namun implementasi konkrit poin-poin dan mekanisme yang tercantum dalam AOIP tergantung dari kepentingan dan kesempatan masing-masing anggota ASEAN.

Bahwa Indonesia adalah inisiator utama di belakang konsep Indo-Pasifik dari ASEAN, berkaitan dengan kepentingan geostrategisnya. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut yang luas, penguatan keamanan maritim dan kerjasama menjadi suatu prioritas. Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatannya mengumumkan untuk menjadikan Indonesia sebagai "poros maritim dunia". Melalui pengembangan strategi maritim yang komprehensif, beragam tantangan dan permasalahan Indonesia di dalam dan di tingkat regional dan global dapat diidentifikasi dan diatasi melalui bantuan program transformasi dan modernisasi yang konsisten. Konsep ini selain mencakup konsep kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan, terutama memiliki arah sasaran kebijakan dalam negeri yaitu perluasan infrastruktur secara menyeluruh, modernisasi dan pengembangan industri, menarik investasi dan stimulasi perekonomian.

Implementasi konsep poros maritim tertinggal jauh dari rencana awal akibat faktor internal dan eksternal. Meskipun demikian orientasi strategisnya tetap relevan sebagai pedoman bagi kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Pada bulan November tahun 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan bahwa akan mau melaksanakan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pertama. Forum tersebut mau dilaksanakan secara rutin serta mendukung implementasi konkrit Agenda AOIP di bidang kerjasama ekonomi dan konektivitas. Melalui inisiatif ini, ASEAN ingin membuka opsi ketiga selain kedua konsep strategi lain yang sudah ada yaitu Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang didukung oleh Amerika Serikat, Jepang dan Australia dan India serta Chinas Belt and Road Initiative (BRI). Terutama Indonesia dan negara-negara maritim lainnya seperti Malaysia, Brunei dan Singapura inging membentuk forum ini sebagai platform tambahan negara-negara ASEAN untuk penerimaan dana bantuan internasional sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka dari Cina dan Amerika Serikat. Rivalitas kedua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Cina, semakin membebani konstelasi geopolitik di Indo-Pasifik dan situasi politik ASEAN. Melalui forum ini Indonesia sebagai kekuatan regional ingin lebih terlibat dan memperkuat peran pimpinannya di ASEAN seperti yang dahulu. Presiden Joko Widodo tampaknya pada awal masa jabatan keduanya kembali ke pendekatan kebijakan luar negeri semulanya.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi prioritas bagi Indonesia dan ASEAN. Selain itu terdapat topik dan tantangan lain yang penting bagi wilayah Indo-Pasifik: Dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut, pencemaran laut, kejahatan maritim dan pembajakan, konektivitas maritim, „Blue Economy“ dan lain-lain. Semua tantangan ini akan menjadi agenda Forum Indo-Pasifik untuk beberapa tahun ke depan. Akibat pembatasan pandemi COVID-19, jadwal kegiatan forum ditunda beberapa kali dan direncanakan akan berlangsung pada tahun 2022.

Topik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konteks ini adalah tentang kerjasama keamanan. Klaim Cina atas wilayah laut di Laut Cina Selatan bertentangan dengan klaim negara-negara maritim lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Sebagai jalur transit, kawasan ini juga merupakan kunci penting bagi perdagangan global dan ekonomi dunia, sehingga klaim Cina sebagai penguasa tunggal kawasan tersebut, memiliki potensi konflik yang cukup besar. Dikarenakan kepentingan ekonomi, politik dan keamanan yang berbeda-beda dari masing-masing anggota ASEAN, posisi bersama yang jelas terkait tantangan tersebut sampai saat ini belum ada. AOIP menjunjung prinsip penyelesaian konflik dan ketegangan secara damai, kebebasan kapal bernavigasi, transparansi dan ketertiban berbasis aturan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dari negara-negara anggota ASEAN, tidak ada yang tertarik untuk konflik terbuka dengan Cina. Indonesia beserta negara anggota lainnya ASEAN mencoba menemukan solusi yang bersifat kompromi dan damai.

Negara Mitra Kerjasama Bantuan Pembangunan

Indonesia juga di masa mendatang akan di tingkat internasional mendukung negara selatan dunia dan memperjuangkan multilateralisme dan kebijakan dunia yang berbasis peraturan. Sebagai negara berkembang yang berpenghasilan menengah dan negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia akan terus bergantung pada subsidi dan bantuan pembangunan dari negara-negara industri, namun demikian porsi bantuan pembangunan untuk negara-negara di belahan dunia selatan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kemampuan finansial dan ekonomi Indonesia. Selama ini program kerjasama pembangunan Indonesia terutama ditujukan kepada negara dan kawasan di mana Indonesia memiliki kepentingan politik ekonomi, luar negeri, dan keamanan. Antara lain termasuk negara tetangga seperti Timor-Leste, Papua Nugini dan Filipina, negara-negara kepulauan Pasifik Melanesian Spearhead Group (MSG), negara-negara ASEAN Myanmar, Laos, Kamboja dan negara-negara di Afrika (Sudan, Kenya, Ethiopia) di Timur Tengah (Wilayah Palestina) dan Asia (Afghanistan, Sri Lanka). Dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan G20, Indonesia secara tradisional tampil sebagai pendukung bagi negara-negara berkembang yaitu seperti dukungannya terhadap hak-hak warga Palestina dan Rohingya.

Kerjasama pembangunan antara Jerman dan Indonesia memiliki tradisi yang Panjang. Kerjasama saat ini berfokus pada bidang perubahan iklim, energi, pengembangan ekonomi yang

berkelanjutan / pendidikan vokasi dan perlindungan lingkungan. Fokus kerja sebelumnya “good governance” akan tetap dilanjutkan sebagai isu lintas sektoral yang akan diperhatikan di semua bidang kerjasama. Jerman memberi bantuan terutama untuk tindakan peningkatan pendapatan negara dan pemberantasan korupsi. Proyek kerjasama bilateral di masa depan akan lebih erat dikaitkan dengan proses –proses regional. Hal ini berlaku terutama bagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/AEC).

Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu aktor tradisional dalam konteks Kerjasama Selatan–Selatan dan dianggap sebagai pendukung multilateralisme dan tatanan dunia yang berbasis peraturan. Kerjasama pembangunan negara berkembang telah dilakukan Indonesia sejak berdirinya sebagai negara merdeka. Meskipun masih dalam besaran yang relatif rendah, namun terus meningkat dan menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Fokus strategi Indonesia dituju pada hubungan antara anggota ASEAN dan hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan Cina. Dengan didirikannya lembaga dana bantuan pembangunan internasional Indo–AID pada tahun 2019 maka bantuan pembangunan internasional Indonesia diberikan sebuah kerangka kelembangaan. Sebagai kekuatan regional yang meningkat di Asia Tenggara, Indonesia akan terus memainkan peran penting dalam kerjasama pembangunan internasional di masa depan, meskipun sumber dana mereka yang terbatas Indonesia akan menjadi mitra global penting dalam mengatasi masalah pembangunan global yang mendesak.

-
- ¹ UNDP in Indonesia: Partnership Initiative for SSTC,, in: <https://bit.ly/3HPsczP> [24.11.2021].
- ² Ebd.
- ³ Engel, Susan 2019: South–South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs 38: 2), S. 218–242, hier: S. 237, Note 6., in: <https://bit.ly/3p08OYj> [24.11.2021].
- ⁴ Ebd., S. 237.
- ⁵ Indonesia South–South Cooperation 2016: Annual Report of Indonesia’s South–South and Triangular Cooperation (SSTC) 2016, in: <https://bit.ly/3p0EqNz> [24.11.2021].
- ⁶ Ebd.
- ⁷ Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’aruf Amin: Nine Priorities Agenda (Nawa Cita), in: <https://bit.ly/3nNS3jD> [24.11.2021].
- ⁸ Ministry of National Development Planning BAPPENAS 2015: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, in: <https://bit.ly/3DNlqHh> [24.11.2021].
- ⁹ Indonesia South–South Cooperation 2017: Annual Report of Indonesia’s South–South and Triangular Cooperation (SSTC) 2017, in: <https://bit.ly/32w3q04> [24.11.2021].
- ¹⁰ Indonesia South–South Cooperation 2018: Annual Report of Indonesia’s South–South and Triangular Cooperation (SSTC) 2018, in: <https://bit.ly/3oWHSbN> [24.11.2021].
- ¹¹ Tahalele, Miranda 2021: Indonesian AID: the politics and bureaucracy of Indonesia’s development cooperation, Devpolicy Blog, 22.02.2021, in: <https://bit.ly/3r2rmd2> [24.11.2021].
- ¹² World Bank: Net official development assistance received (current US\$) – Indonesia, in: <https://bit.ly/32w3vbu> [24.11.2021].
- ¹³ Development Aid 2019: Indonesia launches an International Development Aid Fund. A look back at Indonesia’s aid history, Development Aid Editorials, 9.12.2019, in: <https://bit.ly/3r2rxFe> [24.11.2021].
- ¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2019: Indonesian Aid Strengthens Solidarity and Partnership in the Pacific, 16.12.2020, in: <https://bit.ly/3xkFwHB> [24.11.2021].
- ¹⁵ ASEAN 2019: Outlook on the Indo–Pacific, in: <https://bit.ly/3CHEPsY> [24.11.2021].
- ¹⁶ Senkyr, Jan 2017: Indonesiens Vision einer „Globalen Maritimen Achse“, KAS–Länderbericht 04/2017, in: <https://bit.ly/3FKwWoE> [24.11.2021].
- ¹⁷ Leong, Karl Lee Chee 2020: What to Expect from Indonesia’s Indo–Pacific Push in 2020, The Diplomat, 06.03.2020, in: <https://bit.ly/30Xuign> [24.11.2021].
- ¹⁸ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Politisches Schwergewicht in Südostasien, in: <https://bit.ly/300FV8Z> [24.11.2021].

Imprint

Penulis

Jan Senkyr Direktor Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Jan Senkyr

Kantor Luar Negeri Indonesia

Europäische und Internationale Zusammenarbeit

jan.senkyr@kas.de

Koordinasi seri publikasi:

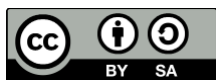
Veronika Ertl

Referentin Entwicklungspolitik

Analyse und Beratung

veronika.ertl@kas.de

Publikasi ini oleh Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. hanya untuk informasi. Tidak boleh digunakan oleh partai politik atau oleh juru kampanye atau pekerja untuk tujuan kampanye. Ini berlaku untuk pemilihan federal, negara bagian dan lokal serta pemilihan Parlemen Eropa.



The text of this work is licensed under the terms of “Creative Commons naming–sharing under the same conditions 4.0 international”, CC BY–SA 4.0 (available at: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>).